|  |
| --- |
| Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)[*www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id*](http://www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id/) |
| **SISTEM PEMUNGUTAN BEA BALIK****NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA****PROVINSI KALIMANTAN BARAT** |
| **Febriati, Margaretha Eni**Universitas Panca Bhakti, Universitas Panca Bhakti Febriati@upb.ac.id

|  |  |
| --- | --- |
| ARTIKEL INFO | ABSTRACT |

 |
| *Article history:**Avaible online jurnal.akuntansi.upb.ac.id* | *The problem in this research is about how the transfer of motorized vehicle ownership fee collection system in West Kalimantan Province, how the effectiveness of collecting Transfer of Motor Vehicle Title Fee in West Kalimantan Province and the factors that influence the collection system of Transfer of Motor Vehicle Title Fee in West Kalimantan Province. The purpose of this study was to determine the system for collecting Transfer of Motor Vehicle Title Fee in West Kalimantan Province, to determine the effectiveness of collecting Transfer of Motor Vehicle Title Fee in West Kalimantan Province and to determine the factors that mediate the collection of Transfer of Motor Vehicle Title Fee in West Kalimantan Province. The method used in this research is descriptive method, which is to identify the collection system for transferring motor vehicle ownership fees in West Kalimantan Province. The analytical tools used in this research are flowchart analysis, regional tax effectiveness test and questionnaire results. The results of the analysis that have been carried out show that it can be seen that in implementing the system for collecting transfer fees for motor vehicles in West Kalimantan Province, the system is adequate, the Regional Financial and Revenue Management Agency of West Kalimantan Province has implemented the principles of internal control effectively, and the average percentage of the effectiveness of the Transfer of Motor Vehicle Title Fee from 2014 to 2016 is 95%, which means that the collection of Transfer of Motor Vehicle Title Fee carried out by tax collectors in the Regional Government of West Kalimantan Province from 2014 to 2016 has been effective. and from the results of filling in the questionnaire, it appears that there are factors that influence the collection system for transfer of motor vehicle ownership fees in West Kalimantan Province.****Keywords****: Collection system, Effectiveness, Transfer of Vehicle Name Fees, BPKPD* |
|  | **ABSTRAK**Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat, bagaimana efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat, untuk mengetahui efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaharui sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mengidentifikasi sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi kalimantan Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis flowchart, uji efektivitas pajak daerah dan hasil isian koesioner. Hasil analisis yang telah di lakukan menunjukan bahwa dapat di ketahui bahwa dalam melaksanakan sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Kalimantan Barat, secara sistem telah memadai, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan prinsip – prinsip pengendalian internal dengan efektif, dan rata-rata presentase efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2014 hingga tahun 2016 sebesar 95% artinya pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor yang di lakukan oleh petugas pemungut pajak di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 hingga tahun 2016 tersebut sudah berjalan efektif dan dari hasil isian koesioner tampak bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Kalimantan Barat.***Kata Kunci:***Sistem pemungutan, Efektivitas, Bea Balik Nama Kendaraan, BPKPD |

## PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar di Provinsi kalimantan barat adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.Bea Balik Nama Kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan utama bagi pajak daerah Provinsi kaliamantan barat. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kontribusinya yang besar terhadap pajak daerah.Kontribusi tersebut dapat dilihat dari lima jenis pajak yang termasuk dalam pajak Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan perpindahan kepemilikan antara satu pihak dengan pihak lain juga semakin bertambah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kalimantan Barat pada tahun 2014 hingga tahun 2016 cenderung menurun, hal tersebut bertolak belakang dengan fakta dilapangan dimana pertumbuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut akan mempengaharui penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan peraturan dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah provinsi.Dengan diserahkannya kewenangan peraturan dan pengelolaan BBNKB kepada daerah provinsi, maka diharapkan penerimaannya semakin meningkat setiap tahunnya seirama dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di daerah provinsi kalimantan barat.Dengan pendapatan Asli daerah yang cukup menjanjikan timbul pertanyaan terhadap sistem pemungutan pajak daerah.pada dasarnya sistem digunakan untuk menunjukan suatu cara di suatu daerah dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

**Rumusan Masalah**

Rumusan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi kalimantan Barat?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi kalimantan Barat?
3. Faktor-faktor yang mempengaharui sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi kalimantan Barat ?

**Tujuan Penelitian**

 Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaharui sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi kalimantan Barat.

**Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi ilmu Ekonomi khusus nya jurusan Akuntansi

 Di harapkan dapat mengasah pola berfikir dan menganalisis suatu persoalan pada bidang konsentrasi yang sedang penulis geluti sekarang ini ,yaitu mengenai Akuntansi Perpajakan

1. Bagi Pemerintah Daerah

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat di sajikan sebagai masukan bagi pemerintahan daerah,khusus nya pemerintahan daerah Provinsi kalimantan Barat untuk melakukan evaluasi kebijakan baik terhadap penerimaan yang di terima maupun terhadap belanja yang akan di keluarkan

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro dalam Suandy, 2008).

**Fungsi Pajak**

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak yakni fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). (Pudyatmoko, 2009).

1. Fungsi *Budgetair/*Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. (Nurmantu, 2003). Dana yang telah masuk ke dalam kas negara kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

1. Fungsi *Regulerend*/Mengatur

Pajak mempunyai fungsi mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

**Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak supriyanto (2011) Menyatakan akuntansi adalah suatu proses pencatatan penggolongan,pengikhtisaran suatu transaksi keuangan, sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintahan dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjuk secara langsung.

Jadi, Akuntansi Perpajakan adalah suatu proses pencatatan penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan di akhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai denagan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan (SPT).

Muljono (2010) menyatakan fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan di gunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Menurut Rochmat soemintro dalam munawir (1992) “ pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal(kontra prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan atau hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Siahaan, 2013). Menurut Yurida (2012), secara umum tujuan dari pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian,

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ataas penyerahan pertama di tetapkan:

1. 10% ( Sepuluh persen ) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum
2. 3% (tiga persen) untuk kendaraaan bermotor alat berat/besar

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ataas penyerahan pertama di tetapkan:

1. 1% ( satu persen ) untuk kendaraan bermotor umum dan tidak umum
2. 0,3%(nol koma tiga persen) untukkendaraaanbermotoralat berat/ besar

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ataas penyerahan pertama di tetapkan:

1. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraaan bermotordan tidak umum
2. 0,03% (nol koma nol tiga persen)untuk kendaraaan bermotor alat berat/besar

Besarnya BBNKB dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. BBNKB dikenakan juga bagi kendaraan bermotor yang belum pernah BBN di Indonesia (kendaraan bekas Jepang, kendaraan dump dari Pemda dan TNI).

**METODE PENELITIAN**

**Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang di lakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Kuncoro (2011:172) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 hingga 2016.
2. Mengidentifikasi realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 hingga 2016.
3. Menghitung perkembangan dan tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 hingga 2016.

**Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang di peroleh dari Kantor Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Bidang Pajak.Dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tersebut terdapat mengenai Jumlah Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotortahun 2014 hingga 2016 pada Provinsi Kalimantan Barat,selain itu informasi lain yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi documenter yang dilakukan penulis.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan flowchart, uji efektifitas pajak daerah serta menganilisis hasil isian kuesioner yang dilakukan penulis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Sistem Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Kalimantan Barat.**

Berdasarkan pada pembahasan flowchart tersebut dan dapat di ketahui bahwa dalam melaksanakan sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Kalimantan Barat, secara sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari proses pendaftaran sampai proses pemungutan telah memadai, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan prinsip – prinsip pengendalian internal dengan efektif. Para pegawai pemungut pajak telah memiliki kualitas dan kompetensi yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari kepolisian, jasa raharja, pegawai UPTD Samsat Provinsi Kalimantan Bara. Namun, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat juga harus lebih meningkatkan sistem pengendalian intern atas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan cara meningkatkan kinerja para petugas pemungut pajak agar dapat lebih aktif dalam melakukan pemungutan Balik Nama Kendaraan Bermotor dam pengelolaan sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus lebih di tingkatkan dan diperketat agar pemungutan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat di lakukan dengan lebih baik sehingga untuk kedepannya PAD pada Provinsi Kalimantan Barat ini semakin meningkat.

**Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Kalimantan Barat**

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa rata-rata presentase efektiftas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah sebesar 95% dengan total target penerimaan Rp.1.305.000.000.000dan total realisasi Rp.1.204.691.162.299.Ini berarti pemungutan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor yang di lakukan oleh petugas pemungut pajak di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 tersebut sudah berjalan dengan efektif,meskipun realisasi penerimaan BBNKB pasa tahuin 2014 hingga tahun 2016 belum mencapai target.

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaharui Sistem Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Kalimantan Barat**

Dari pembahasan Rekapitulasi hasil jawaban responden atas sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat di ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemungutan sehingga membutuhkan perbaikan di segala aspek pendukung. Dan untuk mengetahui upaya perbaikan yang dapat di lakukan guna memperbaiki kelemahan sistem pemungutan yang ada, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan faktor yang menghambat sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Kalimantan Barat, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga faktor-faktor tersebut mempengaruhi realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat. Dan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

Didalam pemberian sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2008,bahwa Peraturan/Kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, artinya sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran masih belum diterapkan seoptimal mungkin di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak.

1. Faktor eksternal

Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi Peraturan Daerah atau Ketentuan yang telah ditetapkan akan pentingnya membayar Pajak khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih minim dan harus di tingkatkan, agar pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu

Berdasarkan pada temuan faktor-faktor penghambat yang telah di paparkan sebelumnya, maka harus di lakukan upaya perbaikan. Upaya perbaikan tersebut dapat di lakukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus meningkatkan sistem pengendalian intern atas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan cara meningkatkan kinerja para petugas pemungut pajak agar dapat lebih aktif dalam melakukan pemungutan pajak agar Peraturan/Kebijakan tersebut bisaterimplementasi dengan baik.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebaiknya Melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsungmelalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dengan adanya upaya perbaikan tersebut diharapkan Sistem Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Kalimantan Barat dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan lebih maksimal agar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapatmemberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah untuk masa yang akan datang.

**Daftar Pustaka**

Abdul Halim (2009). *Pengertian Efektivitas,*Bandung : PT Remaja Posda Karya.

Mahud cahaya (2010). *Pengertian Efektivitas,*Bandung : PT Remaja Posda Karya.

Ariana, H., Suharyono, dan Devianti, D. R. (2011). *Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

Fransiska Andar Rosalina. 2008. Analisis efektifitas dan kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.Jakarta : Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia

Halim dan Mujib. (2009). *Pajak daerah Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Indrianto dan supomo*. (2002). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta :PT. Raja Grafind Persada.

Muljono. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Yogyakarta

Indriani Luisa Lohonauma, 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*.* Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Muhamad Fauzan & Moh.Didik Ardiyanto. 2013. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Balik nama kendaraan bermotor dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011*.* Ponorogo : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Oktofiandry Makaluas Jantje. 2010. Analisis kontribusi pajak BBNKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota manado pada tahun 2002-1011. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Pudyatmoko. (2009). *Ciri-ciri atau karakteristik pajak*. Jakarta : PT Adi Mahasatya.

Soemintro dalam suandy. (2008). *Teori pajak , pengertian pajak.* Jakarta : Balai Pustaka.